

Budaya anti korupsi: Kunci membangun integritas bangsa Indonesia

Alya Miftakhul Khoiriyah

Program Studi Manajemen, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
e-mail: alyamiftakhulkhoiriyah@gmail.com

Kata Kunci:

Budaya anti korupsi; integritas nasional; pendidikan karakter; pencegahan korupsi; good governance.

Keywords:

Anti-corruption culture; national integrity; character education; corruption prevention; good governance.

ABSTRAK

Korupsi masih menjadi tantangan serius bagi Indonesia karena menimbulkan kerugian ekonomi, menghambat pembangunan, memperlebar kesenjangan sosial, serta menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Penelitian ini bertujuan menganalisis pentingnya budaya anti korupsi sebagai kunci membangun integritas bangsa Indonesia. Metode yang digunakan adalah studi kepustakaan dengan menelaah berbagai literatur terkait budaya anti korupsi, pendidikan karakter, integritas nasional, dan good governance. Hasil kajian menunjukkan bahwa pemberantasan korupsi tidak cukup hanya melalui penegakan hukum, tetapi memerlukan pendekatan budaya yang menanamkan nilai kejujuran, tanggung jawab, disiplin, keadilan, dan kepedulian. Pendidikan karakter berperan strategis dalam membentuk generasi berintegritas sejak dini melalui proses pembelajaran dan keteladanan. Selain itu, penerapan prinsip good governance seperti transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat mampu memperkuat sistem pemerintahan yang bersih. Sinergi antara pemerintah, masyarakat, keluarga, dan lembaga pendidikan menjadi faktor utama dalam menumbuhkan budaya anti korupsi secara berkelanjutan. Dengan demikian, budaya anti korupsi merupakan fondasi penting untuk mewujudkan bangsa Indonesia yang adil, bersih, bermartabat, dan sejahtera bagi seluruh masyarakat.

ABSTRACT

Corruption remains a serious challenge for Indonesia because it causes economic losses, hampers development, widens social inequality, and reduces public trust in government institutions. This study aims to analyze the importance of an anti-corruption culture as the key to building national integrity in Indonesia. The method used is a literature review by examining various sources related to anti-corruption culture, character education, national integrity, and good governance. The findings indicate that combating corruption cannot rely solely on law enforcement, but also requires a cultural approach that instills honesty, responsibility, discipline, justice, and social awareness. Character education plays a strategic role in shaping a generation with integrity from an early age through learning processes and exemplary conduct. In addition, the implementation of good governance principles such as transparency, accountability, and public participation can strengthen a clean governmental system. Synergy among government, society, families, and educational institutions is the main factor in fostering a sustainable anti-corruption culture. Therefore, an anti-corruption culture is an essential foundation for realizing a just, clean, dignified, and prosperous Indonesia for all citizens nationwide.

Pendahuluan

Sebagai negara berkembang, Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berintegritas. Salah satu persoalan



yang hingga kini belum terselesaikan secara optimal adalah korupsi. Permasalahan ini tidak hanya menimbulkan kerugian secara ekonomi, tetapi juga menghambat pembangunan, memperlebar kesenjangan sosial, serta menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintah.

Berbagai upaya telah dilakukan pemerintah, seperti pembentukan lembaga khusus dan penguatan regulasi hukum. Namun demikian, praktik korupsi masih kerap ditemukan di berbagai sektor. Hal ini menunjukkan bahwa korupsi tidak hanya berkaitan dengan aspek hukum, tetapi juga berhubungan dengan nilai, moral, dan budaya masyarakat (Abqoriya, 2025).

Situasi tersebut menegaskan bahwa upaya yang dilakukan untuk pemberantasan korupsi tidak bisa hanya bergantung pada pendekatan hukum yang bersifat penindakan. Melainkan diperlukan adanya langkah yang lebih dalam dengan akar permasalahan, yaitu dengan membangun kesadaran serta membentuk karakter individu yang memiliki integritas tinggi. Dalam hal ini, budaya anti korupsi menjadi sebuah solusi yang sangat penting dalam upaya jangka panjang.

Budaya anti korupsi tidak hanya sekedar untuk menghindari tindakan korupsi, tetapi juga mencerminkan penanaman nilai-nilai etika seperti kejujuran, tanggung jawab, kedisiplinan, serta keadilan dalam kehidupan sehari-hari. Apabila nilai-nilai tersebut tertanam dan tumbuh dengan kuat, maka akan tercipta individu yang berintegritas, yang mana pada akhirnya dapat mendorong terwujudnya bangsa Indonesia yang lebih bersih, adil, dan bermartabat.

Pembahasan

Konsep Budaya Anti-Korupsi

Budaya anti korupsi merupakan kumpulan nilai, norma, dan kebiasaan yang berkembang dalam kehidupan masyarakat yang secara sadar menolak serta menghindari segala bentuk praktik korupsi. Budaya ini tidak hanya berkaitan dengan tindakan yang terlihat secara langsung, melainkan juga mencakup pola pikir, sikap batin, serta kesadaran moral individu dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Dengan kata lain, budaya anti-korupsi tidak sekedar berbicara tentang apa yang dilakukan seseorang, tetapi juga tentang bagaimana seseorang berpikir dan mengambil keputusan secara etis dalam berbagai situasi. Terdapat nilai-nilai dasar yang menjadi fondasi utama dalam membangun budaya tersebut, di antaranya kejujuran, tanggung jawab, disiplin, kemandirian, keberanian, kepedulian, kerja keras, kesederhanaan, serta keadilan. Nilai-nilai tersebut perlu diperkenalkan sejak awal dan dikembangkan secara berkelanjutan agar menjadi karakter yang melekat pada diri individu. Ketika nilai-nilai tersebut telah terinternalisasi dengan baik, maka seseorang akan memiliki benteng moral yang kuat untuk menolak segala bentuk penyimpangan, termasuk praktik korupsi (Gufroon et al., 2022).

korupsi tidak hanya dipandang sebagai tindakan individu semata, melainkan sebagai masalah penting yang dapat merusak berbagai bidang dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Korupsi berdampak pada menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, terhambatnya pembangunan nasional, serta meningkatnya kesenjangan sosial. Oleh karena itu, upaya pemberantasan korupsi tidak cukup hanya dengan

penegakan hukum saja, tetapi juga harus diimbangi dengan pembangunan budaya anti korupsi yang kuat di tengah maraknya masyarakat (Hanafi et al., 2023).

Pembentukan budaya anti korupsi merupakan proses yang tidak berlangsung secara cepat, melainkan membutuhkan waktu yang panjang dan berkelanjutan. Hal ini memerlukan keterlibatan berbagai pihak, mulai dari keluarga, lingkungan pendidikan, hingga institusi pemerintah. Dalam keluarga, nilai kejujuran dan tanggung jawab dapat ditanamkan sejak dini melalui pembiasaan perilaku sehari-hari. Dalam lingkungan pendidikan, nilai-nilai anti korupsi dapat diintegrasikan dalam proses pembelajaran, baik melalui materi pelajaran maupun keteladanan dari para pendidik. Sementara itu, pemerintah bersama lembaga terkait berperan penting dalam membangun suatu sistem yang transparan, akuntabel, serta bebas dari praktik korupsi (Amiruddin & Kosbandhono, 2025).

Selain itu, penerapan budaya anti korupsi dapat diawali dari tindakan-tindakan sederhana dalam aktivitas sehari-hari, seperti berkata dan bertindak secara jujur dalam berkata dan bertindak, tidak mengambil hak orang lain, tidak menyalahgunakan kepercayaan yang diberikan, serta mematuhi aturan yang berlaku. Meskipun terlihat sepele, kebiasaan-kebiasaan kecil ini memiliki peran besar dalam membentuk karakter individu (Amiruddin & Kosbandhono, 2025). Jika hal tersebut dilakukan secara konsisten, maka nilai-nilai tersebut akan menjadi bagian dari kepribadian yang sulit untuk tergoyahkan.

Seiring berjalannya waktu, jika nilai-nilai anti korupsi telah menjadi kebiasaan yang melekat dalam diri individu, maka akan terbentuk masyarakat yang memiliki kesadaran tinggi terhadap pentingnya integritas. Masyarakat yang berintegritas akan lebih berani menolak, melawan, bahkan melaporkan tindakan korupsi yang terjadi di sekitarnya. Dengan demikian, budaya anti korupsi tidak hanya menjadi wacana, tetapi benar-benar terwujud dalam kehidupan nyata sebagai upaya bersama dalam menciptakan bangsa yang bersih, adil, dan sejahtera (Hanafi et al., 2023).

Integritas Nasional sebagai Pilar Pembangunan Bangsa

Integritas nasional merupakan aspek penting dalam membangun bangsa yang kuat, stabil, dan berdaya saing tinggi. Integritas tidak hanya berkaitan dengan perilaku individu semata, tetapi juga mencerminkan kualitas moral dan karakter suatu bangsa secara keseluruhan. Dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara, integritas menjadi landasan utama dalam menciptakan tatanan sosial yang tertib, adil, dan bermartabat. Dengan adanya integritas yang kuat, masyarakat akan lebih mudah menjalin kepercayaan satu sama lain serta mendukung terciptanya persatuan dan kesatuan (Masyhudi, 2022).

Integritas menjadi kunci dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga publik. Integritas yang dimiliki oleh para penyelenggara negara akan mendorong terciptanya sistem pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan bertanggung jawab. Selain itu, integritas juga berperan dalam mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang, sehingga kebijakan yang diambil benar-benar berpihak pada kepentingan masyarakat. Dengan demikian, dengan hadirnya integritas dapat memperkuat legitimasi pemerintah di mata publik (Kamil, 2024).

Rendahnya integritas sering menjadi penyebab utama munculnya praktik korupsi di berbagai sektor. Kondisi ini terjadi karena adanya ketidaksesuaian antara nilai yang diyakini dengan tindakan nyata yang dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Ketika seseorang tidak mampu menjaga konsistensi antara nilai, ucapan, dan perbuatan, maka peluang terjadinya penyimpangan akan semakin besar. Oleh karena itu, integritas harus dibangun melalui keselarasan antara ketiga aspek tersebut agar tercipta perilaku yang jujur dan bertanggung jawab (Gufron et al., 2022).

Di samping itu, integritas nasional turut dipengaruhi oleh budaya yang tumbuh di tengah masyarakat. Budaya tersebut berperan besar dalam membentuk cara berpikir, sikap, serta perilaku individu. Jika masyarakat terbiasa dengan perilaku tidak jujur atau melanggar aturan, maka akan sulit untuk mewujudkan integritas yang kuat. Sebaliknya, apabila nilai-nilai seperti kejujuran, tanggung jawab, dan keterbukaan dijunjung tinggi dan diterapkan secara konsisten, maka akan tercipta kehidupan sosial yang lebih sehat, transparan, dan berkeadilan. Dengan demikian, budaya yang baik akan menjadi fondasi kuat dalam membangun integritas nasional (Mulyoto, 2020).

Peran Pendidikan Karakter dalam Membentuk Budaya Anti Koupasi

Pendidikan karakter memiliki peran penting dalam membentuk individu yang berintegritas. Melalui proses pembelajaran, nilai-nilai etika seperti kejujuran, tanggung jawab, serta etika sosial ditanamkan secara berkesinambungan sehingga mampu membentuk pribadi yang kuat dan berkarakter. Hal ini menunjukkan bahwa pendidikan tidak hanya menitikberatkan pada aspek pengetahuan, tetapi juga pada pembentukan sikap dan perilaku seseorang (Kardiyem et al., 2024).

Selain itu, pendidikan karakter perlu disesuaikan dengan tahap perkembangan individu agar proses penanaman nilai dapat berjalan secara optimal. Pendidikan anti korupsi juga bertujuan untuk meningkatkan kesadaran generasi muda terhadap dampak negatif korupsi serta menumbuhkan sikap tegas dalam menolak segala bentuk penyimpangan (Harahap et al., 2024).

Lebih lanjut lagi, integrasi nilai-nilai etika seperti kejujuran, transparansi, dan akuntabilitas dalam proses pendidikan menjadi dasar penting dalam membentuk perilaku yang berintegritas. Dengan demikian, pendidikan tidak hanya berfungsi sebagai sarana transfer ilmu pengetahuan, tetapi juga sebagai media pembentukan karakter dan perilaku yang mencerminkan integritas dalam kehidupan sehari-hari (Kardiyem et al., 2024).

Strategi Pencegahan Korupsi Melalui Pendekatan Budaya

Upaya pencegahan korupsi merupakan langkah yang sangat krusial dalam memberantas praktik korupsi secara menyeluruh. Salah satu pendekatan yang dinilai efektif adalah melalui pendekatan budaya, karena pendekatan ini menitikberatkan pada perubahan cara berpikir, nilai, serta perilaku individu dalam kehidupan sehari-hari. Pendidikan juga memiliki peran penting dalam menanamkan budaya anti korupsi sejak awal. Melalui pendidikan, individu dibentuk untuk memiliki kesadaran moral dan sikap tegas dalam menolak segala bentuk tindakan korupsi. Hal ini menunjukkan bahwa pendidikan tidak hanya berfungsi sebagai sarana akademik, tetapi juga sebagai media pembentukan karakter yang berintegritas (Gufron et al., 2022).

Selain itu, strategi pencegahan korupsi dapat dilakukan melalui berbagai upaya, seperti edukasi dan sosialisasi nilai-nilai anti korupsi kepada masyarakat, penguatan nilai moral dalam kehidupan sosial, penerapan sistem yang transparan dan akuntabel, serta pemberian sanksi sosial bagi pelaku penyimpangan. Langkah-langkah tersebut dilakukan untuk mewujudkan lingkungan yang mendorong terbentuknya sikap jujur dan penuh tanggung jawab (Hanafi et al., 2023).

Pendekatan berbasis budaya ini dianggap lebih efektif untuk jangka panjang karena mampu menumbuhkan kesadaran dari dalam diri individu. Dengan demikian, pencegahan korupsi tidak hanya didasarkan pada rasa takut terhadap hukuman, tetapi juga pada kesadaran moral untuk menjunjung tinggi nilai integritas dalam kehidupan bermasyarakat (Harahap et al., 2024).

Peran Good Governance dalam Mencegah Korupsi

Good governance atau tata kelola pemerintahan yang baik menjadi faktor utama dalam mewujudkan sistem pemerintah yang bersih dari praktik korupsi. Nilai-nilai seperti keterbukaan, akuntabilitas, serta partisipasi masyarakat harus diterapkan secara konsisten agar tercipta pengelolaan pemerintahan yang terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan. Sebagaimana yang kita ketahui, penerapan good governance berperan penting dalam meningkatkan mutu pelayanan publik sekaligus mengurangi potensi penyalahgunaan kekuasaan. Hal ini karena tata kelola yang baik akan mendorong terciptanya sistem yang lebih transparan dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah (Akib, 2021).

Dalam sebuah penelitian dijelaskan bahwa, internalisasi nilai-nilai seperti kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab menjadi dasar penting dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih. Nilai-nilai tersebut tidak hanya bersifat normatif, tetapi harus diimplementasikan secara nyata dalam perilaku aparatur negara. Dengan demikian, penerapan *good governance* dan penguatan budaya anti korupsi merupakan dua hal yang saling berkaitan dan saling mendukung dalam menciptakan sistem pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berintegritas (Gufron et al., 2022).

Upaya Penguatan Budaya Anti Korupsi

Untuk menghadapi berbagai tantangan dalam pemberantasan korupsi, diperlukan langkah strategis yang melibatkan berbagai pihak secara terpadu. Salah satu langkah yang bisa dilakukan adalah memperkuat pendidikan anti korupsi di semua jenjang pendidikan. Melalui pendidikan tersebut, nilai-nilai kejujuran, tanggung jawab, dan integritas dapat ditanamkan sejak dini sehingga mampu membentuk kesadaran individu untuk menolak praktik korupsi serta memiliki komitmen terhadap nilai-nilai moral (Gufron et al., 2022).

Di samping itu, penanaman nilai-nilai Pancasila juga berperan penting dalam membangun budaya anti korupsi. Nilai-nilai seperti keadilan, kejujuran, dan tanggung jawab dapat menjadi pedoman dalam membentuk karakter individu yang berintegritas. Penanaman nilai ini perlu dilakukan secara konsisten dan berkelanjutan agar tidak hanya dipahami secara teoritis, tetapi juga diwujudkan dalam tindakan nyata dalam kehidupan sehari-hari (Kardiyem et al., 2024).

Upaya lainnya meliputi peningkatan transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan, penguatan sistem pengawasan, serta peningkatan partisipasi masyarakat dalam mengawasi kebijakan publik. Langkah-langkah tersebut penting untuk menciptakan sistem yang lebih terbuka, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat, sekaligus meminimalisir peluang terjadinya penyimpangan. Selain itu, diperlukan juga pembiasaan budaya jujur dalam lingkungan sosial serta keteladanan dari para pemimpin sebagai contoh nyata dalam penerapan nilai anti korupsi. Dengan adanya kerja sama antara pemerintah, masyarakat, dan lembaga pendidikan, budaya anti korupsi dapat berkembang secara lebih efektif dan berkelanjutan dalam kehidupan sosial (Akib, 2021).

Kesimpulan dan Saran

Berdasarkan uraian pembahasan yang telah dipaparkan, dapat ditarik kesimpulan bahwa budaya anti korupsi memiliki peran yang sangat penting dalam membangun integritas bangsa Indonesia. Korupsi tidak semata-mata merupakan persoalan hukum, tetapi juga berkaitan erat dengan lemahnya nilai moral serta karakter individu. Oleh sebab itu, pendekatan yang berfokus pada pembentukan budaya dinilai lebih efektif sebagai solusi jangka panjang dibandingkan hanya mengandalkan penegakan hukum.

Penanaman nilai-nilai seperti kejujuran, tanggung jawab, disiplin, dan keadilan melalui pendidikan karakter terbukti berkontribusi dalam membentuk individu yang memiliki integritas tinggi. Selain itu, tingkat integritas nasional juga dipengaruhi oleh budaya yang berkembang di tengah masyarakat serta sejauh mana prinsip-prinsip good governance diterapkan dalam sistem pemerintahan. Apabila nilai-nilai tersebut dijalankan secara konsisten, maka akan tercipta tata kelola yang lebih transparan, akuntabel, dan minim praktik korupsi.

Dengan demikian, budaya anti korupsi tidak hanya berhenti pada tatanan konsep, tetapi perlu diimplementasikan secara nyata dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini memerlukan sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan lembaga pendidikan agar nilai-nilai integritas dapat tertanam dan berkembang secara berkelanjutan.

Untuk mendukung terwujudnya budaya anti korupsi, ada beberapa hal penting yang perlu diperhatikan. Pertama, pendidikan anti korupsi harus terus diperkuat dan diterapkan di semua jenjang pendidikan. Tidak hanya sebatas teori, tetapi juga melalui pembiasaan sikap jujur, disiplin, dan tanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari. Kedua, pemerintah perlu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam setiap kebijakan serta memperkuat sistem pengawasan agar peluang terjadinya korupsi dapat ditekan. Pemanfaatan teknologi juga dapat membantu menciptakan sistem yang lebih terbuka dan mudah diawasi.

Ketiga, masyarakat diharapkan lebih aktif dalam mengawasi jalannya pemerintahan serta berani menyampaikan kritik terhadap tindakan yang menyimpang. Partisipasi masyarakat sangat penting sebagai bentuk kontrol sosial. Terakhir, keteladanan dari para pemimpin harus menjadi perhatian utama. Sikap dan perilaku pemimpin akan sangat berpengaruh dalam membentuk budaya di masyarakat. Apabila seluruh pihak mampu melaksanakan perannya dengan baik, maka budaya anti korupsi dapat terwujud secara lebih efektif dan berkelanjutan.

Daftar Pustaka

- Abqoriya, R. (2025). *Peran agama dan nilai spiritual dalam melawan korupsi*. <https://repository.uin-malang.ac.id/24645/>
- Akib, M. (2021). *Implementasi good governance dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat* (W. Kurniawan, Ed.). CV. Pena Persada Redaksi.
- Amiruddin, M., & Kosbandhono, E. (2025). *The Importance of The Religious Pulpit As an Anti-Corruption Tool in Malang Society*. <https://repository.uin-malang.ac.id/23076/>
- Gufron, G., Chamidah, D., & Firdausy, M. A. (2022). *Pendidikan Anti Korupsi Berbasis Islam untuk Membangun Zona Integritas di Kalangan Mahasiswa Ma'had al-Jami'ah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang*. <https://repository.uin-malang.ac.id/13574/>
- Hanafi, I., Yahman, Rahmawati, & Mahka, M. F. R. (2023). *Pendidikan anti korupsi: Evaluasi dan pemantauan*. PT. Literasi Nusantara Abadi Grup.
- Harahap, T. K., Permatasari, M., & Widiyanto, B. (2024). *PENDIDIKAN ANTI KORUPSI* (M. K. Dr. Mustaqim, S.H., Ed.; Vol. 2). TAHTA MEDIA GROUP.
- Kamil, S. (2024). *Pendidikan integritas anti-korupsi* (N. N. M., Ed.). PT. Remaja Rosdakarya.
- Kardiyem, Harwindito, B., Supentri, Ansharah, I. I., Suroyo, Aini, L. N., Saputra, N. G., Ents, D., Fredyarini, N. A., & Astuti, D. P. (2024). *Pendidikan karakter*. PT. Penamuda Media.
- Masyhudi. (2022). *Sistem integritas nasional dalam pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia* (R. A. Nugroho, Ed.). PT. Kompas Media Nusantara.
- Mulyoto, G. P. (2020). Pengembangan modul praktikum mata kuliah Pancasila dengan model project citizen untuk menanamkan nilai-nilai antikorupsi pada mahasiswa. *Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan*, 17(1), 67–80. <https://doi.org/10.21831/jc.v17i1.31062>